



**SUMBER BERITA**

**JUMAT, 10 JULI 2020**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Penyelesaian Rekomendasi BPK RI Terus Berlanjut**

RBI, KEPAHANG - Mendapat predikat Opini Wacana Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun anggaran 2019, Pemkab Kepahiang dituntut segera menyelesaikan rekomendasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari BPK RI. Jika tidak diselesaikan dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka bisa menimbulkan tindakan hukum.

Untuk memastikan rekomendasi dari BPK RI ditindak lanjuti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah membentuk Panitia Kerja (Panja). Panja ini nanti menelusuri dan mengawasi penyelesaian rekomendasi dari BPK RI tersebut. "Tugas Panja yang sudah kita bentuk ini, agar membedah satu-persatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK tersebut. Dan minta OPD terkait untuk segera menyelesaikan temuan tersebut," ungkap Waka I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra SE, M.Si.

Sambungannya, Panja harus menggali penjelasan secara

rinci dari jajaran OPD dan inspektorat menangani poin-poin catatan yang disampaikan BPK RI. Keterangan dari eksekutif dibutuhkan agar dewan bisa melakukan fungsi pengawasan. "Tujuannya tentu untuk menyelesaikan semua TGR atau rekomendasi dari BPK," imbuhnya.

Ketua Panja Hendri A.Md bersama anggota lainnya yang sudah dibentuk menggelar rapat secara internal. Masing-masing anggota Panja dan Tenaga Ahli DPRD telah menyampaikan saran mengenai mekanisme pembahasan, waktu dan pokok pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. "Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, Panja merupakan bentuk pengawasan DPRD terhadap LHP BPK RI. Kita akan undang OPD untuk memberikan rekomendasi agar ditindaklanjuti, sebagai bahan evaluasi agar apa yang menjadi temuan bisa diselesaikan," demikian.(ide)